

PERANAN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KOORDINASI KERJA PADA SATUAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JABAR

1. Mai Marini

STAI Darussalam Kunir
maimarini21@gmail.com

2. Quratal Aeni

STAI Darussalam Kunir
qurrotulaeni20072002@gmail.com

3. Ilham Agustian Widia Yusuf

STAI Darussalam Kunir
widyayusuf@gmail.com

4. Ahmad Farihin

STAI Darussalam Kunir
ahmadfarihin2789@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the construction, operationalization, and development design of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The research approach is a qualitative method with data collection techniques and interviews. The research instrument is an interview guide. Informants include personnel: the National Police, transportation services, and banks. Some of the obstacles in the current implementation of ETLE include: Limited availability and capacity of ETLE cameras, disintegration of recording data, data inconnectivity, variations in the availability of budgets for each Regional Police for procuring cameras used in ETLE operations, out of sync in regulatory provisions regarding manual ticketing, and electronic ticketing.

Kata Kunci: Traffic; Effectiveness; Electronic Traffic Law Enforcement

Informasi Artikel

Naskah Diterima:
10 April 2023

Naskah Direvisi
1 Mei 2023

Naskah Diterbitkan:
25 Juni 2023

1. PENDAHULUAN

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengelolaan dalam bentuk berbagai kegiatan, dimana sistem kerja sama dari beberapa orang disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan struktur organisasi yang dihasilkan tentunya struktur organisasi yang baik, sehat, berfungsi dan efisien. Suatu bentuk struktur organisasi tujuan menurut wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan dan dibedakan dari garis, fungsional dan sistem organisasi personalia.

Pengembangan organisasi berguna untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengubah nilai dan struktur organisasi, serta membuat operasi lembaga menjadi lebih efisien. Dalam melakukan perubahan, manajer dituntut tidak hanya memiliki karakteristik pribadi yang mendukung dirinya sebagai pemimpin untuk melaksanakan proses perubahan dengan baik, tetapi juga memiliki keterampilan mengelola proses perubahan dengan cara pendekatan organisasi maupun keterampilan mengelola sumber daya manusia sekolah.

2. KAJIAN PUSTAKA

1. Peranan Organisasi

Peran organisasi membentuk aturan atau pedoman dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik dapat memotivasi organisasi untuk menjadi lebih baik.

Organisasi dapat didefinisikan secara statis dan dinamis. Dikatakan statis karena organisasi merupakan suatu wadah tempat sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dikatakan dinamis karena organisasi adalah suatu sistem atau tindakan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi

harus mengacu pada prinsip-prinsip organisasi baik dalam kegiatan maupun efisiensinya (Ibnu Syamsi 1994:13).

Kesimpulannya adalah bahwa organisasi adalah suatu bentuk struktur organisasi yang didasarkan pada tujuan wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja dalam organisasi tersebut, dan dapat dibedakan menurut garis, kinerja, sistem organisasi garis dan personalia dan lain-lain. menghormati definisi tugas individu dan kelompok kerja dalam mengatur pembagian kerja dan rekonsiliasi tugas.

2. Koordinasi kerja

Koordinasi kerja mengacu pada prosedur yang menghubungkan fungsi-fungsi unit kerja organisasi.

Menurut Sutarto (2004:129) Koordinasi: Penyelarasan usaha individu untuk mencapai tujuan dan sasaran kelompok. (Koordinasi: menyelaraskan upaya individu untuk mencapai tujuan dan sasaran kelompok).

Menurut Handoko (2002:195), koordinasi adalah suatu proses dimana tujuan dan kegiatan dipadukan antara unit-unit organisasi yang berbeda (departemen atau bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Manullang (2001: 93), koordinasi berarti upaya mengarahkan kegiatan unsur-unsur organisasi agar sedapat mungkin berkonsentrasi untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan umum organisasi. Pekerjaan semacam itu disebut prinsip koordinasi.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dimana peneliti mengkaji hanya satu masalah dan mengumpulkan informasi lebih baik diarahkan pada tujuan penelitian tentang

peran organisasi dalam meningkatkan koordinasi kerja di Satuan Lalu Lintas Daerah Jawa Barat.

Dalam penelitiannya sumber data primer adalah informan, tempat dan peristiwa, sedangkan sumber data sekunder adalah arsip dan dokumen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi Dan Prosedur Pelatihan

Sesuai Lampiran XXI Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda. Tugas dan fungsi organisasi Ditlantas:

Misi Ditlantas adalah memajukan dan melaksanakan kegiatan lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, evaluasi masalah lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, dan patroli jalan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, dan pelaksanaan Kamseltibcarlantas.

a) Tugas dan Fungsi Organisasi Ditlantas

Ditlantas melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pengembangan kepegawaian dan logistik, pengelolaan dan administrasi, serta pengelolaan keuangan;
- 2) pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi masalah lalu lintas,serta penyelenggaraan Anevi dan pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- 3) Dikmas Pelaksanaan lalu lintas, penerapan teknologi lalu lintas dan lalu lintas jalan, pelaksanaan pencegahan dan pengendalian standardisasi serta pelaksanaan audit dan inspeksi lalu lintas;

- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penegakan hukum, termasuk peraturan, menangani kecelakaan, pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan kejahatan dan kekerasan;
- 5) Menyelenggarakan dan mensosialisasikan pengenalan register kendaraan bermotor, SIM, STNK dan BPKB serta penyiapan materi SBST; dan organisasi kegiatan Turjagwali.

b) Job Description Polda Jawa Barat

Uraian tugas Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- KAPOLDA: Tugasnya adalah mengelola, mengembangkan dan mengkoordinasikan unit-unit organisasi di lingkungan POLDA. Memberikan saran dan pengamatan kepada Kapolri.
- WAKAPOLDA: Perannya membantu Kapolda dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pribadi di seluruh unit organisasi di lingkungan Polda. Penyelenggaraan Kepolisian Daerah apabila Kapolda tidak mampu memenuhi batas kewenangannya.
- DITLANTAS: Menyelenggarakan semua kegiatan lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum dan penyidikan masalah lalu lintas. Manajemen pelayanan pengemudi angkutan dan kendaraan bermotor, yang melakukan patroli jalan antar daerah dan memastikan keselamatan.

c) Job Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat

Uraian tugas Biro Perhubungan Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Dirlantas bertanggung jawab atas tugas sehari-hari Kapolres di bawah pengawasan Wakapolres.
- 2) Wadirlantas bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap Dirlantas.
- 3) SubbagRenmin Departemen yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran kerja, pengelolaan dan pengembangan operasi, pengelolaan dan pengelolaan keuangan, serta layanan administrasi dalam lingkungan pengelolaan lalu lintas.
- 4) Bagbinopsnal Bertanggung jawab untuk pembinaan dan pelatihan manajemen operasional, Bagbinopsnal juga dapat mengembangkan sistem teknologi informasi komunikasi lalu lintas, menyelenggarakan Anevia dan mengelola informasi dan dokumentasi lalu lintas.
- 5) Subditkamsel, tugas dari subseksi Kamsel adalah analisis dampak lalu lintas, kerjasama di bidang transportasi dan pengaturan lalu lintas dalam Dikma, perencanaan lalu lintas dan operasi lalu lintas, dan penerapan standar pencegahan dan operasional.
- 6) Subdittakkum, yang tugasnya memfasilitasi penyidikan. Visi dan misi Polda Jabar

Dishub Polda Jawa Barat memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Tentang visi dan misi Ditlantas Polda Jawa Barat.

Visi dan Misi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat

Dalam menjalankan kegiatan, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan.

Adapun visi misi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat yaitu :

❖ **Visi**

Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Seluruh Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

❖ **Misi**

Berdasarkan pada Misi Polda Jawa Barat yang telah ditetapkan, maka Misi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat untuk periode 2020 – 2024 adalah Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di bidang lalu lintas di Seluruh Daerah Hukum Polda Jawa Barat”, dengan makna uraian sebagai berikut:

Misi Ditlantas Polda Jabar adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat industri transportasi dengan melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membina perkembangan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menjaga nilai dan dapat diandalkan. sistem hukum lalu lintas yang bebas korupsi dan menjamin tercapainya lingkungan hidup yang lestari.



Gambar 1 : Logo Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat

Struktur Organisasi

Korps lalu lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.

Korlantas polri terdiri dari 3 direktorat, sebagai berikut :

- 1) Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel)
Ditkamsel merupakan elemen terpenting atau unsur pelaksana utama yang terletak langsung di bawah Kakorlantas. Peran dan fungsinya penyelenggaraan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran teknis lalu lintas adalah analisis dampak lalu lintas, kerja sama dan koordinasi di bidang transportasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- 2) Direktorat Penagak Hukum (Dirgakum)
Dirgakum bertanggung jawab atas ketertiban umum, termasuk pemenuhan persyaratan lalu lintas. Dirgakum saat ini dipimpin oleh Brigjen. Pol. Dr. Aan Suhanan, DI.
- 3) Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident)
Ditregident adalah elemen aplikasi Korlantas yang paling penting, terletak di bawah Kakorlanras. Bertanggung jawab atas administrasi pendaftaran kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi. Dirjen saat ini dipimpin oleh Brigjen. Pol. dr. Yusri Yunus.

Kepolisian nasional atau Korlantas Polri juga terdiri dari tiga divisi/bidang:

- 1) Bagian Operasional(Bag Ops)
Bag Ops merupakan bagian dari Asisten Direktur yang berdomisili langsung di bawah Kakorlantas dan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penertiban, penertiban terpadu, mengamankan kegiatan masyarakat atau instansi pemerintah, serta mengkoordinir kerjasama dan pengawasan. keamanan Korlanta HQ. Saat ini dikelola oleh Kombes. Pol. Eddy Djunaedi, S.I.K.

- 2) Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bag Renmin)

Bag Renmin adalah asisten pemimpin yang bekerja langsung di bawah Kakorlantas. Di Korlantas, Bag Renmin bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan promosi kepegawaian dan logistik, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi, serta pengadaan dan administrasi. Saat ini direktornya adalah Kopol Titis Eko Yuliana.

- 3) Bagian TIK (Bag TIK)

Bag TIK merupakan unsur penunjang administrasi yang langsung berada di bawah Kakorlantas. Adapun Tugas divisi TIK adalah melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menghasilkan layanan informasi terkait pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, menghasilkan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi di lingkungan Korlanta Polri. Combes yang menjabat sampai sekarang. Pol. Abdul Syukur, S.H.

2. Strategi Bisnis

Untuk mencapai tujuan, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategi dan 1 (satu) sasaran impact yaitu keamanan dan ketertiban Provinsi Jawa Barat. Sasaran strategi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- b) Penegakan hukum bidang lalu lintas secara berkeadilan.
- c) Pemenuhan sarana prasarana dan Almatasus Lantas yang modern.

3. Aspek Manajemen

- a) Aspek Produksi

Aspek produksi adalah salah satu aspek bussines planning yang menjelaskan proses produksi yang dapat berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Adapun aspek produksi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat yaitu penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kepolisian (STNK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

b) Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan fakta yang digunakan dalam penilaian kondisi keuangan perusahaan secara umum. Aspek keuangan pada Direktorat Lalu Lintas dapat dilihat melalui DIPA. Adapun perbandingan DIPA yang digunakan sebagai rencana anggaran yang dimana pada Tahun Anggaran 2021 (T. A. 2021) yaitu sebesar Rp117.677.872.000 dan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.471.494.000. Sehingga berdasarkan DIPA tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan atau program yang tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2022.

c) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan faktor penting yang digunakan untuk memetakan pasar sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Untuk aspek ini Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar tidak menggunakan Aspek Pemasaran karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dimana hal tersebut wajib dimiliki oleh setiap masyarakat yang

mengoperasikan ataupun memiliki kendaraan.

d) Aspek SDM

Aspek SDM merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi karena dapat mendukung performa suatu organisasi. Aspek aspek sumber daya manusia meliputi aspek kompetensi, motivasi, loyalitas dan disiplin kerja. Pada aspek SDM, perekrutan SDM Ditlantas Polda Jabar di atur oleh Biro SDM Polda Jawa barat yang dimana memenuhi syarat dan ketentuan serta sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk pengembangan yang dilakukan seperti sertifikasi, dan lain – lain.

4. Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Polda Jawa Barat

Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan yang mengabaikan peraturan lalu lintas. Namun, faktor non-manusia seperti ban kempes, rem rusak, berlubang dan lain-lain juga ditemukan.

Dalam melakukan penegakan Hukum, Polda Jabar menerapkan beberapa konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan lalu lintas. Konsep ini juga berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 22 tahun 2009. Dalam mengimplementasikan konsep undang-undang lalu lintas, Polda Jabar selalu memperhatikan asas dan tujuan, serta pelaksanaannya berdasarkan asas keterbukaan, asas. tanggung jawab , asas pembangunan berkelanjutan, asas partisipasi, asas keuntungan, asas efektif dan efisien. , asas seimbang, asas terpadu, asas mandiri. Sebagai hasil riset kami, Indonesia menerapkan program ETLE sebagai pengganti tilang manual.

Penerapan Etle dilandasi oleh kebutuhan akan konsep penegakan hukum lalu lintas yang teratur dan praktis, dengan tetap memperhatikan keterbatasan aparat kepolisian dan menghindari praktek tilang yang korup, seperti yang sering terjadi. Sehingga denda tilang tidak maksimal sampai ke kas negara.

a) Pengertian ETLE

E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan sistem tilang elektronik atau sistem pencatatan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem CCTV untuk memantau petugas polisi yang bertugas di jalan. Pihak kepolisian berharap dapat menekan pelanggaran lalu lintas, dengan bantuan alat CCTV akan tercipta masyarakat lalu lintas yang tertib sehingga angka kecelakaan akibat pelanggaran dapat diminimalkan. memantau kecelakaan lalu lintas.

Dan mengetahui penyebab kemacetan yang bisa meningkat karena volume kendaraan yang tinggi, kendaraan mogok dan musim hujan yang menyebabkan banyak genangan air yang membuat pengendara lebih berhati-hati dengan kendaraannya dan mengurangi kecepatannya. penyebabnya juga bisa lampu merah padam karena mati listrik. Jadi tujuan dari kamera CCTV atau ETLE ini adalah untuk memantau langsung kondisi di lapangan.

b) Cara ETLE mendeteksi pelanggaran lalu lintas

Polda Metro Jaya meluncurkan ETLE Mobile atau tiket elektronik yang dapat ditempelkan pada seragam polisi atau mobil dan motor polisi, sejauh ini telah dipasang 244 kamera ETLE dan 30 unit kamera di 12 Polda secara nasional dengan waktu perekaman 4 jam non stop.

c) Cara Kerja ETLE :

- ETLE dikerahkan di kendaraan patroli
- Perangkat secara otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas
- Petugas mengirimkan bukti pelanggaran
- Petugas mengidentifikasi informasi pengemudi melalui sistem Elektronik Registration dan identifikasi (ERI)
- Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik yang melanggar
- Pemilik Kendaraan melakukan Konfirmasi melalui Website atau datang langsung ke kantor Sub. Direktorat Penegakan Hukum
- Petugas mengeluarkan tiket tilang dengan metode pembayaran via BRIVA atau transfer.

Mengingat kurangnya penerapan tilang Elektronik, Penting juga bagi warga untuk mengetahui besaran denda jika ada pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera. Namun, sanksi ini berlaku untuk pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun besaran Denda tilang elektronik sesuai jenis pelanggarannya, sebagai berikut :

- Pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan diancam dengan tilang elektronik sebesar Rp 500 Ribu atau 2 bulan kurungan.
- Tidak memakai sabuk pengaman diancam dengan tilang elektronik sebesar Rp 250 ribu atau 2 bulan kurungan.
- Menggunakan smartphone saat mengemudi diancam dengan denda Rp 750.000 atau 3 bulan kurungan. Denda e-tiket Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan untuk pelanggaran kecepatan.
- Menggunakan plat nomor palsu diancam dengan tilang elektronik sebesar Rp 500.000 atau 2 bulan kurungan.

- Berkendara melawan arus diancam dengan denda Rp 500.000 atau kurang dari 2 bulan. Denda e-tiket Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan karena pelanggaran lampu merah.
- Tidak memakai helm atau memakai helm yang berbeda dengan Standar Nasional Indonesia(SNI) diancam dengan tilang elektronik sebesar Rp 250.000 atau maksimal 1 bulan kurungan.
- Bepergian dengan lebih dari 3 orang akan menghasilkan e-tilang sebesar Rp 250.000 atau 1 bulan kurungan.
- Pengemudi mabuk dijatuhi hukuman 3.000.000 hingga satu tahun penjara.

E. SIMPULAN

Organisasi atau lembaga pasti membutuhkan koordinasi, karena dengan adanya koordinasi kerja akan lebih mudah untuk mengatur suatu lembaga tersebut.

Lalu lintas merupakan faktor penting penunjang kemajuan suatu kota, karena lalu lintas membuat segala aktivitas berjalan dengan lancar. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling berat adalah ketidaktahuan pengguna jalan, masih banyak pengguna jalan yang tidak menjaga etika dan di kalangan pengguna jalan. Karena diperparah dengan banyaknya pemimpin yang tingkat kematangan atau jumlahnya masih kurang, dan rendahnya moral menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan untuk mematuhi hukum.

Tentang penerapan hukum dalam ketentuan pelanggaran lalu lintas dan kewenangannya. Merancang peraturan perundang-undangan yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran yang berujung pada kecelakaan lalu lintas.

Aplikasi Etle didasarkan pada kebutuhan akan penegakan hukum dengan konsep praktis dan lalu lintas yang teratur, mengingat jumlah polisi yang terbatas dan menghindari praktik tilang yang sering koruptif. Dampak Akibatnya, denda tilang tidak maksimal masuk ke kas negara.

Dan bagi masyarakat luas harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi mengikuti peraturan lalu lintas untuk menjamin keselamatan jalan. Bersama-sama kami menerapkan situasi keselamatan lalu lintas yang teratur dan lancar. Dilarang kabur saat operasi lalu lintas dan jangan menyalahgunakan jabatan orang tua, keluarga atau kerabat untuk meniadakan saksi pelanggaran lalu lintas.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Perpol No 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda
- Fremont E. Kast, James E. Rosenberg, Organization and Management, (Organisasi dan Manajemen), Terjemahan A Hasymi Ali, Cetakan Keempat, Edisi Keempat, Bumi Aksara, Jakarta 1995.
- Sutarto, 2004, Foundations of Organisation, Seventh Print, Gajah Mada Publishers, Jogjakarta.
- Thoha, Miftah, 2005, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.